



JiKTI
JARINGAN PENELITIAN KTI



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



POTRET PENYELUNDUPAN MANUSIA DI KABUPATEN BULUKUMBA

Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I.

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
Anggota Peneliti JiKTI Provinsi Sulawesi Selatan

Prof. Ma'ruf Kasim, S.Pi., M.Si., Ph.D.

Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Haluoleo Kendari
Peneliti Senior JiKTI Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyelundupan manusia adalah masalah lokal yang biasa berdampak pada masalah nasional bahkan internasional. Hingga tahun 2010, kasus penyelundupan manusia terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Jumlah kasus imigran gelap yang masuk ke Indonesia selama periode bulan Januari hingga bulan Mei, tahun 2010 mencapai 61 kasus. Angka ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena mencapai hampir 100% dari jumlah kasus ditahun sebelumnya, yaitu sebesar 31 kasus. Jumlah imigran gelap yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,7%, atau meningkat sebesar 67 orang sehingga jumlah imigran pada tahun 2010 adalah 1.245 imigran, sedangkan di tahun 2009 adalah 1.178 imigran. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat bahwa pemerintah Indonesia mengirimkan kembali para imigran ke negara asal, sedikitnya 1.290 orang imigran gelap, setiap tahunnya.

Penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. Salah satu

jalur praktek penyelundupan manusia tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan semi-permanen di sepanjang garis pantai Kabupaten Bulukumba. Dengan modal Perahu Phinisi dan pengalaman melaut yang diturunkan turun temurun, sebagian nelayan dan pelaut Bulukumba menjadikan diri mereka bagian dari jaringan sindikasi *smuggler* yang penuh resiko. Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa adalah negara-negara tujuan *smuggling* yang dituju oleh nelayan Bulukumba. Praktek ini telah berlangsung sedikitnya satu setengah dekade.

Beberapa faktor pendorong terus terjadinya perdagangan manusia di Indonesia adalah letak geografis Indonesia dengan perairan yang cukup luas dan adanya keterampilan membuat kapal dengan kualitas yang baik sehingga dapat dipakai untuk penyelundupan manusia yang terjadi di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bisnis perdagangan manusia menjadi salah satu yang sangat menjanjikan karena imbalan yang cukup besar. Kurangnya perhatian serius dari pemerintah untuk dapat meminimalisasi kasus ini merupakan bagian kecil yang mendorong terus berlangsungnya praktek penyelundupan manusia tersebut.



Foto: Syamsul Asri/JiKTI-BaKTI

Suasana di Kantor Imigrasi Sulawesi Selatan yang dibanjiri gelombang imigran asing.

Adapun modus operandinya adalah sebagai berikut; para pelaku penyelundupan manusia (biasanya mereka adalah *asylum seeker*) membayar agen internasional agar membawa mereka menuju Australia dan Selandia Baru. Pembayaran dilakukan dua kali, setengah atau sepertiga dibayar di depan (diperuntukkan agen internasional untuk menggerakkan jaringan agen lokalnya) dan selebihnya dibayarkan setelah sampai di Australia dan Selandia Baru. Sebelum sampai ke negara tujuan, uang pembayaran penyelundupan manusia dipegang oleh keluarga mereka di kampung halaman. Selama proses bisnis ini, tidak jarang penipuan menimpa pelaku penyelundupan manusia. Setelah memasuki wilayah Malaysia dengan visa turis, mereka kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui perairan Kalimantan. Dari sini seluruh dokumen resmi mereka dimusnahkan, dan dengan demikian resmilah mereka berstatus sebagai imigran ilegal. Dari Kalimantan hingga Bulukumba, rata-rata mereka dipindah-tangankan oleh 2 atau 3 agen lokal. Mereka masuk dan keluar bandara dengan bantuan agen lokal tersebut, hingga menempati sebuah rumah/hotel terakhir sebelum menaiki perahu Phinisi untuk diselundupkan ke luar negeri.

Penyelundupan manusia yang melibatkan nelayan Bulukumba terbangun ke dalam jaringan internasional. Nelayan Bulukumba dalam hal ini terdiri dari dua kelompok; *Pertama*, pembuat perahu Phinisi di Kecamatan Bontobahari yang menyediakan perahu Phinisi khusus. *Kedua*, Anak Buah Kapal dan Juru Mudi Kapal yang pulang-pergi antara pelabuhan-pelabuhan rakyat Bulukumba dan pelabuhan DKI Jakarta. ABK dan JMK ini merupakan anak-anak muda dan lelaki dewasa perantau asal Bulukumba ke DKI Jakarta. Sindikat penyelundupan manusia

Imigran ilegal yang gagal menyeberang ke Australia dari Pantai Samboang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba di pertengahan Mei 2013.

dan mitra kerjanya yakni manusia selundupan terikat dalam relasi sosial ekonomi yang benar-benar bertumpu di atas kepercayaan yang sangat tipis. Manusia selundupan hanya menyerahkan setengah uang jasa dari total harga yang disepakati kepada penyelundup. Sisanya tetap dipegang oleh sanak keluarga manusia selundupan di kampung halaman. Setengah tarif tersebut baru akan ditransfer jika manusia selundupan telah benar-benar mencapai tujuan, yakni Australia atau Selandia Baru.

Penyelundupan manusia adalah bisnis yang sangat besar. Harga yang dibayar oleh satu orang penyelundupan manusia sebesar USD. 2500-3000. Jaringan penyelundupan manusia yang beroperasi di Bulukumba melibatkan individu dan jaringan individu internasional. Mereka disebut oleh kepolisian sebagai pengurus, yakni agen internasional dan agen lokal. Agen internasional biasanya mereka adalah *asylum seeker* asal Timur Tengah yang telah berhasil mencapai Australia atau Selandia Baru, hidup enak, lalu tergerak untuk memanggil keluarga untuk mengikuti jejak mereka. Bisnis kemudian tumbuh cepat. Sedangkan agen lokal adalah individu atau oknum berkebangsaan Indonesia yang menghubungkan uang agen internasional dengan pemilik kapal, ABK dan JMK, mencari akomodasi dan penginapan, menyuap polisi dan mengamankan "paket kiriman" hingga berangkat ke Australia dan Selandia Baru atau berpindah tangan ke agen lokal lainnya. Kemiskinan dan ketertinggalan akses informasi tentang bahaya penyelundupan manusia merupakan dua sebab langsung mengapa nelayan Bulukumba (baik sebagai pembuat dan pedagang perahu maupun sebagai pelaut) mau melibatkan diri sebagai bagian jaringan sindikasi perdagangan manusia internasional. Melihat besarnya bisnis ini serta kompleksnya jaringan yang ada, beberapa permasalahan yang ada dalam upaya penanganan perdagangan manusia antara lain:



Foto: Syamsul Asri/JiKTI-BaKTI

- Masih kurangnya kesadaran dari pelaku akan resiko yang terjadi dari perdagangan manusia.
- Resiko nyawa masih menjadi imbalan yang tetap mau dilakukan oleh sebagian pelaku bisnis perdagangan manusia
- Besarnya nilai transaksi yang dibarengi besarnya resiko menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa pekerja perdagangan manusia.
- Masih adanya keterlibatan oknum
- Belum optimalnya kerja dari para pihak terutama dari pekerja.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan manusia antara lain:

1 Pemberian penyuluhan kepada masyarakat, nelayan dan penduduk sepanjang daerah pantai agar meningkatkan sikap sadar dan waspada terhadap pendatang asing.

2 Membentuk badan khusus atau unit kerja khusus pada level Pemda Bulukumba yang bertugas mempersepsi dan menangani patologi keimigrasian pada umumnya maupun penyelundupan manusia pada khususnya.

3 Pembentukan Unit Gabungan Penanganan Penyelundupan manusia melalui kerjasama Pemerintah Kota/Pemda, Polrestabes/Polres, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Departemen Perhubungan, serta Imigrasi.

4 Melakukan penetrasi informasi melalui media cetak, elektronik mengenai pola jaringan penyelundupan manusia.

5 Evaluasi penempatan petugas penyelundupan manusia yang tidak maksimal dan cenderung melakukan penyelewengan dalam penanganan penyelundupan manusia.

6 Penelusuran transaksi keuangan pola jaringan penyelundupan manusia dan pelaku asing terorganisir ke pelaku lokal terorganisir.

7 Pembuatan aturan penanganan penyelundupan manusia secara berkesinambungan melalui penyesuaian kasus terbaru.

8 Terkhusus situasi di Kabupaten Bulukumba yang mengimplementasikan syariat Islam sebagai basis pelaksanaan dan evaluasi otonomi daerahnya, maka kami menyarankan agar Pemda Bulukumba mampu dan mau melibatkan Ulama Syara` (ulama tradisional non-struktural yang memiliki otoritas karismatik besar) dalam menanggulangi praktik penyelundupan manusia.

Policy Briefs JiKTI 2015 adalah luaran akhir dari rangkaian Hibah Penelitian JiKTI 2014. Hibah Penelitian JiKTI dilaksanakan guna membangun tradisi penyusunan kebijakan berdasarkan penelitian (*evidence-based policy*) di KTI untuk menjawab tantangan pembangunan. Hibah Penelitian JiKTI adalah proses kolaboratif antara JiKTI-BaKTI, peneliti penerima hibah dan Dewan Panel Hibah Penelitian yang beranggotakan 4 orang peneliti senior JiKTI.

Sekretariat Forum KTI – JiKTI

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
 Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar 90125
 Telepon: +62 411 832228 / 833383 Fax. +62 411 852146
 Email: info@bakti.or.id
 Website: www.bakti.or.id | www.batukarinfo.com
 Stock of Knowledge JiKTI: http://jikti.bakti.or.id



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
 FOR DECENTRALISATION (AIPD)





Proses awal pembuatan pondasi kapal pinisi di suatu desa pembuatan kapal di Kabupaten Bulukumba.



Ulama sara` (ulama adat lokal yang berfungsi merestui pembuatan perahu pinisi) sedang melangsungkan prosesi Ammolong, prosesi paling awal dari semua rangkaian pembuatan perahu pinisi, yang jika tidak direstui oleh seorang ulama sara` maka Ammolong dianggap batal dan batal pulalah seluruh prosesi pembuatan sebuah perahu pinisi.